

Pemerintah Kota Banjarmasin Bahas Perhitungan Tarif Persampahan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/436277/pemkot-banjarmasin-bahas-perhitungan-tarif-persampahan>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan membahas perhitungan tarif dan retribusi persampahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021.

"Permendagri ini sudah tiga tahun, namun belum terlaksana, hingga kita bahas dalam forum diskusi agar ada patokan," kata Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu. Menurut dia, forum diskusi kelompok atau *Forum Group Discussion* (FGD) terkait Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah.

"Jadi ada tanggung jawab bersama yang harus kita pikul selaras dengan apa yang tertuang dalam Permendagri dan mudah-mudahan dalam simulasi yang ada di sini terkait perhitungan sampahnya bisa menjadi contoh, paling tidak mencapai standar," ujarnya.

Ibnu Sina menyatakan saat ini angka penanganan dan tata kelola persampahan Kota Banjarmasin itu sudah relatif baik pada angka 73 persen dari sekitar 600 ton produksi sampah per hari.

Kendati begitu, Ibnu Sina mengakui memang terdapat beberapa titik yang masih harus ditangani secara masif dan hal tersebut dipengaruhi sejumlah faktor.

"Secara keseluruhan sudah relatif baik, namun terkadang ada saja sisanya (sampah, red) yang disoroti dan menjadi viral, sementara yang sudah kita benahi, ditangani seperti di sepanjang jalan A Yani itu tidak terekspos dengan baik," ujarnya.

"Sehingga yang sering terekspos itu jeleknya saja, padahal ada upaya yang terus kita lakukan," tambahnya.

Oleh karena itu, tak henti dirinya berpesan, bahwa persoalan sampah ini mesti ditangani sejak dini atau dari penyebabnya.

"Seperti keluhan di Lingkar Dalam dekat Ukhuwah itu sekarang sudah tertangani dengan baik, jam 06.00 WITA clear termasuk simpang 4 Gerilya. Kalaupun masih ada tolong disampaikan karena ada petugas yang kita siapkan," jelasnya.

"Memang kuncinya kita tangani bersama dari sumber, masyarakat memilah sampah, jangan sampai numpuk semua, karena itu (TPS) menampung 5 kelurahan. Makanya penting agar diselesaikan di skala RT, agar tumpukan tidak meluber ke badan jalan," demikian katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/436277/pemkot-banjarmasin-bahas-perhitungan-tarif-persampahan>, 23 Oktober 2024.
2. <https://www.beritaja.com/pemkot-banjarmasin-bahas-perhitungan-tarif-persampahan-beritaja-248221.html>, 22 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e.

sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

- a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));

- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(Pasal 11)
- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)